

TAHUN ANGGARAN 2023 – ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA – PEDOMAN PENYUSUNAN
2022

PERBUP. PASURUAN NO. 153, BD 2022/NO. 153

PERATURAN BUPATI PASURUAN NO. 153 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENYUSUN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa , maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2021; PERPRES No. 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 76 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 44 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 110 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 73 Tahun 2020; PERMEN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 8 Tahun 2022; PERDA Kab. Pasuruan No. 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERDA Kab. Pasuruan No. 3 Tahun 2021; PERDA Kab. Pasuruan No. 1 Tahun 2019.
- Maksud ditetapkannya Perbup ini adalah sebagai bentuk transparan, akuntabel, partisipasi dan ketepatan waktu dalam penetapan APB Desa serta sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah di Desa berdasarkan bidang kewenangannya. Sedangkan tujuannya adalah sebagai pedoman Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan APB Desa setiap tahunnya. Ruang lingkup Pedoman penyusunan APB Desa meliputi sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kewenangan Desa, RKP Desa, dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa, prinsip penyusunan APB Desa, kebijakan penyusunan APB Desa, teknis penyusunan APB Desa dan hal khusus lainnya dalam penyusunan APB Desa.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 30 Desember 2022.